

Menlu Retno Minta ke Taliban Agar Hormati Hak Perempuan

JAKARTA (IM) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengunjungi kantor Taliban yang ada di Doha, Qatar pada Kamis (26/8).

"Di sela kunjungan saya ke Qatar, saya juga bertemu dengan perwakilan dari Kantor Politik Taliban pada Kamis (26/8/2021)," ujar Retno Marsudi dalam akun Twitter @Menlu_RI.

Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi meminta agar Taliban yang baru-baru ini kembali menguasai Afghanistan pasca penarikan mundur militer Amerika Serikat dan sekutunya untuk menghormati hak-hak perempuan.

"Saya menyampaikan kepada pihak Taliban akan pentingnya pemerintahan yang inklusif di Afghanistan, menghormati hak-hak perempuan," kata Retno Marsudi.

Retno Marsudi juga meminta agar pihak Taliban tidak kembali menjadi sarang dari teroris yang nantinya dapat berdampak buruk bagi masyarakatnya.

"Taliban harus bisa memastikan agar Afghanistan tidak lagi menjadi tempat berkembang organisasi teroris maupun kegiatan teroris," jelas Retno Marsudi.

Menlu RI Retno Marsudi juga berdiskusi mengenai berbagai topik terkait evakuasi sejumlah warga Afghanistan, keamanan dan masa depan dari negara Afghanistan.

Dalam kesempatan yang sama, Retno juga bertemu dengan teman kampus baiknya Deputy Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani serta bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad.

● lus

KSAL Minta Prajurit untuk Hindari Gaya Hidup Hedonisme

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono meminta prajurit dan keluarga matra laut hidup sederhana dengan tidak mengikuti hawa nafsu hedonisme. Hal itu disampaikan Yudo dalam kegiatan evaluasi secara virtual bersama Pangkajene Arifin (PA) Komandan Satuan TNI AL, dan kepala dinas jajaran Mabes TNI AL, Kamis (26/8).

"Kalau hanya mengikuti gaya hedonisme bisa berbuat yang kurang baik," ujar Yudo, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8).

Yudo mengkhawatirkan, apabila prajuritnya mengikuti hawa nafsu hedonisme, tak menutup kemungkinan dapat melakukan pelanggaran tindak pidana. Misalnya, terlibat jaringan narkoba dan lain-lain. Karena itu, Yudo

meminta prajurit TNI AL harus berperilaku sederhana, santun, dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, perilaku kesederhanaan itu bisa diwujudkan dalam setiap kegiatan. Contohnya, ketika para pejabat TNI AL melakukan kunjungan kerja ke daerah dan harus memanfaatkan fasilitas penginapan yang dimiliki TNI AL.

"Sehingga tidak harus menginap di hotel," tegas mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) itu.

Dengan berperilaku sederhana ini, Yudo menambahkan, kehadiran TNI AL, baik personel maupun Kapal Republik Indonesia (KRI) dan Kapal Angkatan Laut (KAL) bisa memiliki manfaat yang positif bagi lingkungan sekitar. ● mei



FOTO: ANI

PELECEHAN SEKSUAL DOSEN IAIN KEDIRI

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menuntut usut tuntas pelecehan seksual di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jawa Timur, Jumat (27/8). Aksi belasan mahasiswa tersebut dipicu kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen yang juga ketua salah satu program studi (Kaprosdi) kepada seorang mahasiswi saat bimbingan skripsi.

Kejaksaaan Dalam Dugaan Korupsi di Perum Perindo Periode 2016-2019

JAKARTA (IM) - Penyidik Kejaksaan Agung tengah tengah menyidik dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) 2016-2019. Pada perkara ini, penyidik mendalami piutang macet sebesar Rp 181,1 miliar di perusahaan itu yang diduga sebagai akibat dari kontrol perusahaan yang lemah.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-25/F.2/Fd.2/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (27/8) mengatakan, dugaan korupsi di Perum Perindo diduga berawal ketika perusahaan itu menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) pada 2017.

Dari penerbitan MTN, Perum Perindo mendapatkan dana MTN Rp 200 miliar yang dicairkan pada Agustus dan Desember 2017.

Perum Perindo menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk modal kerja perdagangan.

Hal itu terlihat dari meningkatnya pendapatan perusahaan dari Rp 223 miliar

pada 2016 menjadi Rp 1 triliun pada 2018. Kontribusi terbesarnya berasal dari pendapatan perdagangan.

Pencapaian yang melibatkan semua unit usaha di Perum Perindo tersebut menimbulkan permasalahan kontrol transaksi perdagangan menjadi lemah. Perputaran modal kerja pun melambat dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet.

"Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu, perputaran modal kerjanya melambat dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet sebesar Rp 181.196.173.783," ujar Leonard.

Pada Senin (23/8) lalu, Kejaksaan Agung telah memeriksa dua saksi dari manajemen Perum Perindo. Keduanya adalah MT selaku Direktur Keuangan dan IA selaku anggota Komite Risk Management.

Pemeriksaan saksi-saksi pun terus dilakukan. Pada Kamis (26/8), penyidik memeriksa tiga orang saksi. Mereka adalah AP selaku staf utama Perum Perindo, S selaku General Manager Kantor Cabang Pekalongan Perum Perindo Periode 2019-2020, dan AD selaku staf utama bidang Manajemen Risiko Perum Perindo. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERLUASAN DAN PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI SULTENG
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Gubernur Sulteng Rusdy Masta (ketiga kiri) berfoto dengan petugas medis dan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (27/8). Airlangga Hartarto menekankan pentingnya perluasan dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Sulteng yang baru mencapai 17,48 persen dari target 2,1 juta jiwa agar tercipta kekebalan komunitas.

Demokrat Berharap PAN Merapat ke Istana Bukan untuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Ikutnya PAN dalam pertemuan partai koalisi mengindikasikan tambahnya kekuatan parpol pendukung Pemerintahan Jokowi. Semoga dalam pertemuan membicarakan kepentingan rakyat.

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat mengingatkan agar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/) sore betul-betul membicarakan kepentingan masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menaruh perhatian pada pertemuan tersebut, terlebih ketika Partai Amanat Nasional (PAN) diketahui merapat ke pemerintahan. Menurutnya, hadirnya PAN dalam pertemuan di Istana Kepresidenan mengindikasikan

bertambahnya kekuatan parpol pendukung pemerintah.

"Harapan kita tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," kata Herzaky, Jumat (27/8).

Ia mengingatkan persoalan yang tengah dihadapi Indonesia yaitu pandemi Covid-19. Kondisi pandemi di Indonesia, merupakan situasi yang sangat berat. Pandemi di Indonesia,

lanjutnya, sudah membuat lebih dari 126.000 nyawa anak bangsa meninggal dunia akibat terpapar virus.

Herzaky mengingatkan bahwa hingga saat ini belum tanda-tanda kondisi pandemi di Indonesia akan mereda. Melihat fakta-fakta itu, Herzaky merasa perlu ada kebersamaan dan persatuan anak bangsa menghadapi pandemi.

"Perlu kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, agar kita bisa tetap bertahan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pertemuan pada Rabu sore tersebut betul-betul membahas soal kepentingan rakyat dan mengatasi pandemi. Ia juga berharap, merapatnya PAN ke gerbong koalisi pemerintahan bukan mengindikasikan mulusnya wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepresidenan.

"Semoga untuk rakyat, bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tuturnya.

Atas pertemuan Jokowi, parpol koalisi yang mengajak serta PAN, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat melalui jalan oposisi. "Fokus kami membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah," ucap Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky mengaku bahwa partainya akan terus mengkritisi pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Ia mengingatkan, pemerintahan tetap membutuhkan check and balances atau kekuatan penyeimbang.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah, ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," kata Herzaky. ● han

KPK Dalam Pemberian Fee Proyek pada Mantan Wabup Lampung Utara

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mendalami soal pemberian fee berupa duit dari pengerjaan beberapa proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Hal tersebut didalami saat tim penyidik memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo dan seorang dokter Djauhari. Keduanya diperiksa untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengerjaan beberapa proyek di Pemkab Lampung Utara yang diduga ada jatah fee berupa uang untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/8).

Namun ada seorang saksi yakni Direktur CV Dewa Sakti tidak hadir dan tanpa konfirmasi kepada Tim Penyidik. KPK pun meminta Dewa untuk hadir dan memberikan keterangan pada pemanggilan berikutnya.

"KPK mengingatkan kepada saksi-saksi yang tidak hadir dan tanpa keterangan maupun tidak mengkonfirmasi alasan ketidakhadirannya

untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan Tim Penyidik untuk waktu yang akan ditentukan berikutnya," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menyebutkan pihaknya tengah melakukan pengembangan penyidikan terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

"KPK saat ini sedang melakukan kegiatan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta terkait penerimaan Gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara," kata Ali.

Ali mengaku sesuai kebijakan pimpinan KPK dirinya belum dapat mengungkap secara detail siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Untuk kronologis kasus dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum dapat mengumumkannya dan kami pastikan akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka," jelas Ali.

Ali berjanji pada waktunya akan menyampaikan kepada masyarakat detail konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya. ● han

Satgas Ingatkan Masyarakat Tidak Bosan Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kembali mengingatkan masyarakat agar tidak bosan dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sebab, selama virus corona masih beredar dan bermutasi, maka lonjakan penyebaran virus masih akan terjadi.

"Dan selama virus corona terus beredar dan bermutasi secara global, masih akan terjadi lonjakan infeksi secara berkala," ujar Wiku sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Jumat (27/8).

"Akan tetapi jika virus corona ini berperilaku seperti virus serupa lainnya, lonjakan ini akan mengecil seiring waktu, karena sebagian besar populasi akan memiliki kekebalan, baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya, setiap kali ada gelombang baru," lanjutnya.

Dengan kata lain, tutur Wiku, selama virus corona masih berevolusi, maka perilaku masyarakat juga harus ikut berevolusi. Artinya tindakan pencegahan seperti memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan.

"Pada saat yang sama pemerintah melakukan upaya terbaik memvaksinasi orang

sebanyak mungkin dan secepat mungkin," katanya.

Wiku pun mengingatkan, virus corona diyakini akan hidup berdampingan dengan masyarakat di berbagai belahan negara di dunia. Namun, sebelum kondisi itu tercapai, masyarakat harus sudah mempersiapkan diri dalam masa transisi untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan perkembangan penanganan kasus terus terkendali.

"Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun bukan tidak mungkin, asalkan semua elemen masyarakat mau bekerjasama dengan berkomitmen menjalankan protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan. Termasuk dalam rumah, dalam perjalanan, atau dalam beraktivitas di luar rumah," ungkap Wiku.

Wiku lebih lanjut mengatakan, masyarakat perlu mengetahui bahwa sistem ini adalah modal seseorang untuk tetap hidup sehat dan produktif walaupun Covid-19 masih ada.

Seperti diketahui dalam beberapa hari belakangan ini, kasus harian Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi penambahan kasus harian Covid-19 pada pekan-pekan sebelumnya. ● ber



IDN: ANI

TUGU PEPERA DI PAPUA

Warga melintas di samping tugu Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Kota Jayapura, Papua, Jumat (27/8). Monumen sejarah tugu PEPERA merupakan salah satu dari tiga belas objek wisata sejarah Papua di Kota Jayapura yang terletak di tengah kota di depan ruas jalan utama dan persis berada di depan Mal Jayapura.